

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Literatur Review

Untuk menganalisis implementasi diplomasi maritim Indonesia terhadap penguatan identitas Indonesia sebagai negara maritim melalui IORA, penulis mencoba bersandar pada rujukan-rujukan penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki topik maupun tema yang sama dengan penelitian penulis.

Rujukan bahan pertama yang penulis gunakan sebagai referensi adalah jurnal yang ditulis oleh Dion Maulana Prasetya dari Universitas Muhammadiyah Malang dan Heavy Nala Estriani dari Universitas Airlangga (2018) yang berjudul **Diplomasi Maritim Indonesia dalam *Indian Ocean Rim Association (IORA)*: Peluang dan Tantangan**. Jurnal tersebut berisi mengenai peluang dan tantangan yang dihadapi Indonesia dalam penerapan diplomasi maritim di kawasan samudra hindia serta pemanfaatan keanggotaan Indonesia dalam IORA sebagai salah satu upaya untuk dapat mencapai kepentingan nasional Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Perbedaan penelitian yang akan penulis lakukan dengan bahan rujukan yang penulis gunakan terletak pada fokus studi kasus, dimana penulis hanya akan membahas bagaimana upaya serta peran pemerintahan Indonesia dalam penerapan diplomasi maritim di kawasan Samudra Hindia

khususnya didalam IORA sebagai salah satu upaya penguatan identitas Indonesia sebagai negara maritim serta bagaimana pemerintah Indonesia dapat memanfaatkan peluang yang besar demi terwujudnya Indonesia sebagai negara maritim yang kuat, sedangkan didalam jurnal yang menjadi bahan rujukan tersebut membahas peluang dan tantangan yang akan dihadapi Indonesia dalam penerapan diplomasi maritim di dalam kawasan Samudra Hindia dan sebagai salah satu upaya dalam pencapaian Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Rujukan kedua yang penulis jadikan referensi adalah sebuah jurnal yang ditulis oleh Satya Wira Wicaksana dari Universitas Riau (2017) dengan judul **Nilai Strategis Indian Ocean Rim Association Bagi Indonesia Dalam Penerapan Poros Maritim Tahun 2015**. Jurnal ini berisi tentang pemetaan nilai-nilai strategis dalam IORA yang berhubungan dan bersinggungan langsung dengan kebijakan Indonesia dalam penerapan diplomasi maritim. Dalam jurnal ini dijelaskan nilai-nilai strategis yang berhubungan langsung dengan kebijakan Indonesia terdapat pada tiga bidang yakni politik dan keamanan, ekonomi dan sosial budaya.

Perbedaan studi kasus yang diambil penulis pada penelitian ini dengan jurnal yang menjadi bahan referensi ini adalah dalam penelitian ini penulis memfokuskan masalah pada bagaimana diplomasi maritim diterapkan pemerintah Indonesia di dalam IORA sebagai salah satu upaya dalam penguatan identitas Indonesia sebagai negara maritim sedangkan pada jurnal tersebut menjelaskan nilai-nilai strategis IORA yang bersinggungan langsung dengan kepentingan nasional Indonesia. Perbedaan lainnya juga terdapat pada

pada penelitian ini penulis lebih fokus pada upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah Indonesia demi terwujudnya penguatan identitas Indonesia sebagai negara maritim sedangkan pada jurnal tersebut lebih menjelaskan soal peluang-peluang yang akan didapat Indonesia karena adanya beberapa kesamaan kebijakan yang saling bersinggungan yang dapat menguntungkan Indonesia dalam pencapaian visi poros maritim.

Rujukan ketiga yang penulis juga gunakan sebagai bahan referensi dalam penelitian ini adalah sebuah jurnal yang ditulis oleh Ludi Madu dari Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta (2018) dengan judul **Urgensi *Indian Ocean Rim Association* Dalam Diplomasi Maritim Indonesia**. Jurnal ini berisi tentang bagaimana IORA digunakan sebagai organisasi “pembuktian” peran diplomasi Indonesia di kelas global. Dalam jurnal ini juga menjelaskan bagaimana pemerintahan Presiden Joko Widodo memanfaatkan IORA sebagai pembentuk identitas baru Indonesia yang kelak akan dikenal sebagai negara *maritime power* serta tantangan-tantangan yang harus dihadapi Indonesia.

Perbedaan studi kasus dalam penelitian ini dengan jurnal yang dijadikan referensi tersebut terdapat pada bahwa pada jurnal referensi tersebut fokus pada bagaimana IORA dapat memberikan peluang-peluang yang dapat digunakan Indonesia yang sejalan dengan kebijakan Indonesia serta bagaimana Indonesia dapat memaksimalkan hasil yang akan didapat dengan menghadapi tantangan-tantangan yang ada serta bagaimana hasil tersebut dapat mempengaruhi pembentukan identitas Indonesia yang baru sebagai negara *maritime power*. Sedangkan dalam penelitian ini penulis lebih fokus

membahasa bagaimana penerapan diplomasi maritim dalam upaya penguatan identitas Indonesia sebagai negara maritim melalui IORA serta apa saja upaya-upaya yang telah dilakukan dan perlu dilakukan berdasarkan pada peluang-peluang yang didapatkan Indonesia melalui IORA.

2.2. Kerangka Teoritis/ Konseptual

Dalam penyusunan penelitian ini digunakan kerangka teoritis yang sesuai dengan masalah yang akan diteliti. Kerangka teoritis memuat teori-teori yang dapat membantu penulis dalam pelaksanaan penelitian yang dijadikan sebagai tolak ukur atau pembanding dalam menganalisa masalah penelitian. Kerangka teoritis ini didukung oleh teori-teori dari para pakar dan ahli yang dapat memberikan hasil yang bersidat ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

Untuk lebih memahami dan mempermudah proses penelitian ini, digunakan konsep teori dan pernyataan para pakar tertentu yang memiliki wewenang serta pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan yang sedang diteliti. Sehubungan dengan penelitian yang dibuat kali ini kerangka teoritis ini berhubungan dengan objek penelitian yang akan penulis teliti. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori-teori yang berhubungan dengan negosiasi dan kerjasama antara Indonesia dan negara-negara anggota IORA sebagai organisasi regional kawasan Samudra Hindia.

Burchill dan Linklater (1996) menjelaskan bahwa “Disiplin ilmu hubungan internasional didirikan sebagai reaksi terhadap ketakutan akan konflik yang belum terjadi”. Sedangkan pendapat yang lain yang

dikemukakan oleh Steans dan Pettiford (2009) bahwa “Hubungan internasional merupakan disiplin yang tumbuh sangat luas dengan berbagai macam pendekatan yang berbeda satu sama lain, yang masing-masing memusatkan perhatian pada aspek-aspek tertentu tentang dunia, memunculkan isu-isu tertentu dan didorong oleh perhatian-perhatian tertentu”. Lake (2008) menjelaskan bahwa:

Keputusan sebuah negara memasuki perjanjian internasional, atau tidak, dan memilih apakah akan mematuhi ketentuan mereka, atau tidak. Hubungan internasional sebagai suatu disiplin ilmu terutama berkaitan dengan apa yang dilakukan negara-negara di panggung dunia dan, pada gilirannya, bagaimana tindakan mereka mempengaruhi negara-negara lain.

“Hubungan internasional adalah konsep yang sangat luas. Dalam penggunaan modern ini tidak hanya mencakup hubungan antar negara tetapi juga antara negara dan organisasi non-negara juga organisasi antar negara (IGO)” (Wikinson, 2007).

Viotti dan Kauppi (2001) menjelaskan aktor-aktor hubungan internasional terbagi menjadi empat, meliputi:

1. *States*

Sebuah negara memimpin dalam upaya mempertahankan keamanan fisik penduduk, memastikan kesejahteraan ekonomi warganya, memberikan fokus kesetiaan dan identitas, dan mengklaim kedaulatan. Ini berarti para pemimpinnya mengklaim untuk mewakili dan menggunakan otoritas atas semua orang di dalam wilayah negara dan mengklaim hak untuk otonomi internasional. Bagaimana pun, negara dapat dipandang sebagai hambatan untuk mencapai keamanan, ekonomi, dan identitas ketika mereka menganiaya warga negaranya

sendiri, mengejar kebijakan ekonomi kontraproduktif, dan menuntut kesetiaan yang lengkap dan tidak terbagi ke titik di mana tidak ada perbedaan pendapat yang diizinkan.

2. *International Organization*

Negara bukan satu-satunya prisma yang digunakan untuk melihat hubungan internasional, khususnya di era globalisasi saat ini di mana jelas bahwa tidak ada satu negara pun yang bisa berharap menjadi agen tunggal tindakan kolektif untuk memecahkan masalah global. Organisasi internasional (IO) atau juga dikenal sebagai organisasi antar pemerintah (atau IGO) dapat memainkan peran.

3. *Nongovernmental Organization*

Nongovernmental Organization terdiri dari aktor-aktor internasional swasta dan non-negara yang melintasi batas-batas nasional.

4. *Individuals*

Aktor individual dapat membuat pilihan, bergerak menurut kemauannya sendiri atau menjadai bagian dalam *international organization* atau *nongovernmental organization*. Sementara individu dapat dan bertindak sendiri, mereka biasanya lebih efektif ketika mereka beroperasi dari basis organisasi negara, organisasi internasional, atau organisasi nonpemerintah. Apakah bertindak sendiri atau sebagai agen negara atau non-negara, aktor dapat membuat perbedaan. Sederhananya, hak pilihan manusia penting.

Regionalisme oleh Cantori dan Spiegel (1970) dijelaskan sebagai suatu wilayah yang terdiri dari negara-negara bagian yang memiliki ikatan etnis, linguistik, budaya, sosial, dan historis yang sama. Sebuah makroregion yang dapat didefinisikan dengan berbagai cara yang berbeda, sebagai sebuah benua atau sebagai komposisi supranasional dari negara-negara yang melakukan kerjasama diberbagai proyek politik dan ekonomi, dan memiliki

kesamaan identitas (Hettne, 2005). Lebih jauh lagi Hettne menjelaskan bahwa regionalisme mengacu pada kecenderungan dan komitmen politik untuk mengatur dunia dalam hal wilayah yang mengacu pada proyek regional tertentu.

Mansfield dan Milner (1999) membagi regionalisme kedalam dua kategori, yakni:

Pertama, regionalisme berdasarkan adanya faktor kedekatan geografis, faktor ini memicu munculnya koordinasi atau kerja sama dalam bidang ekonomi dan politik oleh negara-negara yang secara geografis berdekatan. Kedua, regionalisme yang berdasarkan faktor non-geografis, faktor ini menjelaskan adanya aktivitas pemerintah dan non-pemerintah.

Louise Fawcett (1995) menjelaskan “regionalisme merupakan salah satu langkah kecil dalam usaha memperbaiki kemandirian serta kerjasama negara-negara regional. Dimana dimasa lalu, regionalisme dipandang sebagai sebuah inovasi yang sangat positif karena dianggap sebagai salah satu batu loncatan menuju dunia yang lebih terintegrasi. Dengan adanya interaksi-interaksi antar negara regional memungkinkan terjadi kerjasama”. Menurut Obydenkova (2005) dalam Quirico (2005) menjelaskan bahwa “terjalannya komunikasi formal dan informal antar negara-negara regional serta aktor-aktor lainnya yang bersangkutan dapat menghasilkan sebuah kerjasama yang didasari atas persamaan nilai-nilai, kepercayaan dan karakteristik.”

Indian Ocean Rim Association (IORA) dapat dijadikan salah satu contoh dari organisasi internasional yang terbentuk berdasarkan adanya integrasi regionalisme yang didasari pada kedekatan geografis. Hal tersebut

memicu adanya keinginan bersama dalam pengembangan kerjasama dalam bidang keamanan di Samudra Hindia serta kerjasama dalam hal peningkatan ekonomi.

“Organisasi internasional didefinisikan sebagai suatu institusi formal yang dibentuk dari adanya perjanjian antar aktor-aktor di dalam hubungan internasional” (Evans, Newnham, 1998). Organisasi internasional oleh Weiss dan Wilkinson (2014) yaitu “memiliki kedudukan hukum, kantor pusat, kepala eksekutif, staff dan fokus kegiatan yang substantif.” Hennida (2015) menjelaskan bahwa “dalam perspektif realis, setiap negara yang melakukan hubungan internasional lebih mengedepankan pencapaian kepentingan nasionalnya yang mengakibatkan kepatuhan pada organisasi internasional hanya berupa upaya dalam pencapaian kepentingan.”

Claude (1964) menjelaskan bahwa, “Organisasi internasional adalah suatu proses; organisasi internasional mewakili proses yang telah dicapai pada waktu tertentu.” Lebih luas lagi Claude menjelaskan bahwa organisasi internasional terikat pada keinginan serta harapan dari para anggotanya agar sebuah organisasi yang dimiliki dapat menjadi jalan menuju pelebagaan global yang lebih berkembang. Barnett dan Duvall (2014) memaparkan bahwa:

Dari berbagai literatur yang membahas organisasi internasional, terdapat dua alasan utama mengapa negara-negara membuat organisasi internasional. Pertama, membantu menstabilkan tatanan internasional dan aturan-aturan politik. Alasan kedua, negara-negara membuat organisasi internasional untuk bisa meningkatkan prospek kerjasama, mengatasi masalah yang terkait dengan

berbagai macam pilihan, meningkatkan kesejahteraan negara individu maupun secara kolektif negara anggota organisasi. Dengan kata lain, negara-negara anggota berkepentingan untuk menciptakan kerjasama yang saling menguntungkan kondisi kesejahteraan.

“Pembentukan organisasi-organisasi regional ini dibagi kedalam tiga kategori. Pertama, fokus negara-negara guna meningkatkan keamanan kawasan. Kedua, fokus tentang pembangunan ekonomi negara-negara kawasan. Ketiga, adanya tujuan-tujuan yang lebih dari satu fokus untuk dapat membangun sekaligus melindungi kawasannya” (Fawcett, Hurrell, 1995).

IORA berdiri berdasarkan pada pilar-pilar ekonomi, keamanan dan keselamatan maritim, pendidikan dan serta kebudayaan (<https://www.kemlu.go.id/iora>, diakses pada 02 Mei 2019). Berdasarkan pilar-pilar tersebut, IORA dapat dikatakan sebagai organisasi yang memiliki tujuan lebih dari satu fokus untuk dapat membangun dan melindungi kawasannya.

Diplomasi adalah komunikasi yang dibentuk di antara perwakilan yang diakui secara internasional dari entitas yang diakui secara internasional di mana perwakilan ini menghasilkan, mengelola, dan mendistribusikan sesuai dengan kepentingan yang ingin dicapai (Bjola dan Kornprobst, 2013). Lebih jauh lagi dijelaskan oleh Bjola dan Kornprobst bahwa yang paling utama dari diplomasi adalah tentang terlibat dalam komunikasi untuk tujuan mencapai jenis kepentingan tertentu misalnya perlindungan negara terhadap intervensi eksternal. Komunikasi diplomatik ini berkembang untuk mengatasi semakin banyaknya kepentingan-kepentingan yang ingin dicapai, termasuk

kesejahteraan ekonomi, pembangunan, perlindungan lingkungan, keselamatan kesehatan, dan kontrol migrasi. Jönsson dan Hill (2005) menyebutkan bahwa “Diplomasi merupakan salah satu atribut negara dalam mengatasi dan, atau mempersatukan perbedaan-perbedaan pendapat politik”.

Wight (1978) berpendapat bahwa:

Diplomasi harus dilihat sebagai institusi, yang dipahami secara luas sebagai kumpulan praktik-praktik sosial yang relatif stabil yang terdiri dari peran-peran yang mudah dikenali disertai dengan norma-norma yang mendasari dan seperangkat aturan atau konvensi yang mendefinisikan perilaku yang sesuai untuk, dan mengatur hubungan di antara, penghuni peran-peran ini.

Jönsson dan Hill membagi diplomasi kedalam tiga dimensi yaitu, *communication*, *representation* dan *reproduction of international society*. *Communication*, diplomasi sering dicirikan sebagai komunikasi antar negara. Tanpa komunikasi tidak akan ada diplomasi. Bagaimana menghindari kesalahpahaman dan mencapai makna bersama telah menjadi pusat komunikasi diplomatik selama ini. *Representation* merupakan ciri atau simbol yang diperlihatkan setiap delegasi yang diutus setiap negara. *Reproduction of international society* ini mengacu pada cara-cara di mana diplomasi berkontribusi pada penciptaan dan kelanjutan masyarakat internasional tertentu. *Reproduction of international society* menyiratkan bahwa kontinuitas tidak dapat diterima begitu saja. Pengakuan dan sosialisasi diplomatik adalah mekanisme inti di mana diplomasi membantu membentuk dan, pada gilirannya, dibentuk oleh setiap perbedaan ruang internasional yang diberikan.

Diplomasi pada dasarnya hanyalah sebuah pengelolaan hubungan internasional, dan diplomasi maritim adalah pengelolaan hubungan internasional melalui domain maritim. Ini tidak berarti penggunaan diplomasi untuk mengelola ketegangan maritim, melalui kodifikasi hukum internasional, misalnya, tetapi penggunaan aset maritim untuk mengelola hubungan itu sendiri (Miere, 2014). Lebih jauh lagi Miere berpendapat bahwa beberapa diplomasi maritim memang melibatkan pertempuran, meskipun dalam bentuk terbatas, sementara bentuk-bentuk diplomasi kooperatif lainnya tidak bertujuan untuk menaklukkan musuh tetapi untuk membangun sekutu yang kuat atau mempengaruhi aktor lain. Miere membagi diplomasi maritim menjadi tiga kategori, yakni diplomasi kooperatif, diplomasi persuasif dan diplomasi koersif. Diplomasi kooperatif lebih mengutamakan penggunaan “*soft power*” dalam melakukan diplomasi kerjasama maritim, diplomasi persuasif mengutamakan didapatinya sebuah pengakuan oleh negara lain tentang kekuatan maritim sebuah negara, sedangkan pada diplomasi koersif mengutamakan penggunaan “*hard power*” dalam melakukan diplomasi kerjasama maritim.

Diplomasi maritim sendiri menurut Kementerian Luar Negeri memiliki arti negosiasi atau perundingan yang dilakukan oleh dua negara atau lebih mengenai kerja sama kemaritiman.

Dalam penelitian ini Indonesia memiliki misi untuk dapat mewujudkan salah satu harapan Indonesia untuk dapat mempertegas identitas Indonesia sebagai negara maritim dengan penerapan diplomasi maritim khususnya pada kawasan Samudra Hindia melalui satu-satunya organisasi

regional pada kawasan ini yaitu IORA. Terbentuknya kesepakatan antar negara-negara perbatasan Samudra Hindia dengan kesamaan visi utama yakni pertumbuhan ekonomi telah mendasari terbentuknya IORA.

IORA yang termasuk kedalam organisasi internasional menjadi salah satu instrumen yang tepat bagi Indonesia untuk dapat mempertegas dan menguatkan identitas Indonesia sebagai negara maritim melalui kerjasama maritim yang terjalin yang dapat menguatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui sektor maritim. Maka guna tercapainya keinginan penguatan identitas tersebut Indonesia melakukan diplomasi berbasis maritim berdasar kekuatan serta potensi besar yang dimiliki Indonesia dan perlu dikembangkan.

2.3. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka teoritis diatas, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

“Jika penerapan diplomasi maritim Indonesia di dalam IORA diarahkan pada perkuatan pembangunan berkelanjutan berbasis maritim, maka identitas Indonesia sebagai negara maritim akan menguat ditandai dengan terjalinnya kerjasama maritime yang sejalan dengan prioritas kerjasama dalam IORA”

2.4. Verifikasi Variabel dan Indikator

Variabel dalam Hipotesis (Teoritik)	Indikator (Empirik)	Verifikasi (Analisis)
Variabel Bebas: Penerapan diplomasi maritim Indonesia di dalam IORA	1. Diplomasi maritim Indonesia sebagai salah satu kebijakan politik luar negeri Indonesia 2015-2019 2. Peran Indonesia didalam IORA	1. Pembuatan delapan Rencana Sasaran Strategis (RENSTRA) Kementerian Luar Negeri (https://kemlu.go.id/sasaran-strategis-kementerian-luar-negeri) 2. Selama masa keketuaanya dalam IORA, Indonesia berkomitmen untuk mengadakan program kegiatan konkrit bekerja sama dengan Kementerian dan Lembaga RI terkait, yaitu: <i>The 3rd Indian Ocean Dialogue, International Symposium "TORA</i>

		<i>20th Anniversary: Learning from Past and Charting the Future", IORA Business Innovation Center (BIC), IORA Guide for Investment, The 2nd Blue Economy Conference, Regional Workshop:</i> "Interseksi Kebudayaan dan Peradaban di Samudera Hindia" dan IORAG Cultural Expo (https://kemlu.go.id/indian-ocean-rim-association)
Variabel Terikat: Menguatnya identitas Indonesia sebagai negara Maritim	1. Upaya pemerintah Indonesia	1. Pembuatan IORA Concord 2. Kerjasama yang dilakukan Indonesia dengan negara-negara anggota IORA (contoh: India dan Australia) http://apdf-magazine.com/id/india-dan-

		indonesia-meningkatkan- kerja-sama-pertahanan-dan- berencana-mengembangkan- pelabuhan-strategis-di- samudra-hindia/
--	--	---

Tabel 2.1 Operasionalisasi Variabel dan Indikator

2.5. Skema dan Alur Penelitian

